----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
----- PT Darya-Varia Laboratoria Tbk -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), --
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --
oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris. --

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

-Menjalankan usaha dalam bidang: -----

a. industri; -----

b. perdagangan; -----

c. jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ---
sebagai berikut: -----

a. Menjalankan Industri obat-obatan, obat -----
tradisional, bahan baku untuk obat-obatan -----
termasuk obat tradisional, bahan kimia, alat ----
kesehatan, kosmetika dan produk perawatan -----
kesehatan; -----

b. Menjalankan usaha perdagangan produk dan jasa, --
termasuk import dan ekspor segala macam obat ---
obatan, obat tradisional, bahan baku serta bahan
kimia, alat kesehatan, kosmetika dan produk ----
perawatan kesehatan; selanjutnya juga bertindak--
sebagai agen, distributor, pemasok dan perwakilan
dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam-
maupun luar negeri; -----

c. Menjalankan jasa laboratorium, validasi -----
fasilitas, klinik dan rumah sakit. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua-
puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.480.000.000-
(empat miliar empat ratus delapan puluh juta) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal ----
Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ----
dan disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen)-
atau sejumlah 1.120.000.000 (satu miliar seratus-

dua puluh juta) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.280.000.000.000,- (dua ----
ratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh para ---
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham-
dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta. -----

3. Apabila masih terdapat sisa saham yang belum ----
dikeluarkan, maka akan dikeluarkan oleh Perseroan --
menurut keperluan modal kerja Perseroan, dengan ----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan
dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh-
atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, dengan ketentuan bahwa saham-saham yang masih
dalam simpanan dapat dikeluarkan melalui penawaran -
umum terbatas atau dengan cara penawaran terbatas --
(private placement) sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya -----
peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan --
antara lain peraturan yang mengatur syarat dan -----
ketentuan mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak -----
 Memesan Efek terlebih dahulu. -----

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, --
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan-
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada ----
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar--
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang-
sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar -
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.-
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan--
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --
hal pengeluaran saham: -----

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah -
dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----
restrukturisasi yang disetujui oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham; dan/atau -----
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa-
HMETD; -----

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan-
yang berlaku di bidang Pasar Modal Tentang Hak ----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ---

Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas -----
yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang --
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding-
dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing---
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek ---
Bersifat Ekuitas. -----
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas-
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dalam hal ----
terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga --
dan syarat-syarat yang sama. -----
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk -
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau--
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, ---
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum-
Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
oleh Perseroan. -----
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, ---
maka seluruh pemegang saham yang namanya telah -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal -
yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham, akan mempunyai hak -----
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham --
yang hendak dikeluarkan (hak tersebut disebut juga -
Right), masing-masing pemegang saham tersebut akan -
mendapat Right sesuai dengan perbandingan jumlah ---
saham yang dimilikinya. -----
Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih ----
dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right -----
tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak ---
lain. -----
Direksi harus mengumumkan keputusan tentang -----
pengeluaran saham dengan cara penawaran umum -----
terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa-
Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) ---
di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah ---
Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit-
di tempat kedudukan Perseroan. -----
Para pemegang saham atau para pemegang Right -----

tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan-
tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya
pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan --
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini. -----
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di ----
atas, para pemegang saham atau para pemegang Right -
tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ---
ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right-
yang dimilikinya dengan cara membayar lunas dengan--
uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada --
Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk --
mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para ----
pemegang saham yang hendak membeli saham dalam -----
jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang ---
telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan --
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal di Indonesia. -----
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa
saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan ---
oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak --
sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas-
tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk -
membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan -
harga dan syarat yang tidak lebih ringan dari yang -
telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut di atas, yang demikian dengan -----
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran--
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku--
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 di atas secara ----
mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan
hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran-
atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi -
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan--
mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal
asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak -----
mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh -----
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak ---
dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi-
Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya --
yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka ---
Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham -----
dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang ---
saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih-
dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, dengan-

mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran -
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham ---
yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh-
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan. --
Pembelian kembali saham tidak boleh mengurangi modal
dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli -
kembali tidak dihitung dalam menentukan quorum dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak-
memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham dan tidak memberikan hak untuk--
menerima deviden. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --
adalah saham atas nama. -----

Perseroan dapat menerbitkan pecahan nilai nominal --
saham.-----

Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan
hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan ---
nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama ----
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang --
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal ---
sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi ----
tersebut. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu -
orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar -----
Pemegang Saham. -----

3. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak -
yang tidak dapat dibagi. -----

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari --
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham -----
tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) ---
orang wakil bersama. -----

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum ---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -
saham itu ditangguhkan. -----

5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

- c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. tanda pengenal lain sebagaimana akan ditentukan--
oleh Direksi. -----
9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---
dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - f. tanda pengenal lain sebagaimana akan ditentukan--
oleh Direksi. -----
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan
ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama ----
dengan Komisaris Utama atau tanda tangan mereka ----
dapat juga dicetak langsung pada surat saham atau --
surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
11. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan -
atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka -----
kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib --
menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis ----
kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai-
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang --
saham Perseroan. -----
12. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh ----
Direksi untuk saham yang termasuk dalam penitipan --
kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan: ---
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan penitipan kolektif yang -----
bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;-
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----
pencatatan saham; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam --
konfirmasi pencatatan saham; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan ----
kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ---
sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan -
yang lain. -----
13. Setiap pemegang saham menurut hukum harus ----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
14. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa
efek di Indonesia berlaku peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat-saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat-saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang atau rusak sama sekali tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus akan dicatat semua keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat 2 diatas.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Suatu gadai saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta Fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai dan jaminan fidusia atas saham itu dalam Daftar Pemegang Saham.
- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham

ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham ----
tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham--
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti--
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan--
adalah benar-benar sebagai pemegang saham dan surat--
saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -----
ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut--
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana dan hal tersebut telah diberitahukan--
kepada Perseroan. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat--
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada ---
rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta--
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian--
dan perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)--
hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian--
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi -
tersebut kepada Perseroan paling lambatnya 1 (satu)--
hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga--
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam -----

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ---
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek--
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan ---
saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek ----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat--
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang--
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
tersebut.-----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk--
pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal ---
dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik -----
Indonesia, ditempat dimana saham-saham Perseroan ---
dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindehan hak atas saham harus dibuktikan ----
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau--
atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau -
atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas --
saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau --
disetujui oleh Direksi. -----

2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham--
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

3. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam -
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan--
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain -
pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----
disebut RUPS adalah: -----

- a. RUPS tahunan. -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --

- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa --
 3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -
ditutup. -----
 4. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -
Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku --
yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, ----
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa
yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan --
perubahannya selama tahun buku serta rincian ----
masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan Perseroan; yang telah -----
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ----
persetujuan RUPS tahunan. -----
 - laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan -
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan -----
Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas-
dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh --
akuntan publik terdaftar, untuk mendapat -----
pengesahan RUPS tahunan.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar. -----
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah-
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan. -----
 6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai ----
untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang-
telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau-
lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari ----
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata -- acara RUPS luar biasa kecuali mata acara RUPS ----- yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- serta Anggaran Dasar. -----
- 8.a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) --- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar ----- diselenggarakan RUPS, yang diajukan kepada ---- Direksi dengan surat tercatat disertai ----- alasannya. Permintaan penyelenggaraan RUPS --- tersebut harus memenuhi syarat sebagai ----- berikut: -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; --
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan ---- keputusan RUPS; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait-- hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan dan anggaran dasar ---- Perseroan. -----
- b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --- dimaksud pada ayat 8 huruf a di atas diterima - Direksi. -----
- c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b,- pemegang saham dapat mengajukan kembali ----- permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -- Komisaris. -----
- d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c di --- atas diterima Dewan Komisaris. -----
- 9.a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak--- melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu -- sebagaimana diatur dalam ayat 8 huruf b atau 8- huruf d di atas, Direksi atau Dewan Komisaris - wajib mengumumkan: -----
- i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -- dari pemegang saham sebagaimana diatur ---- dalam ayat 8 huruf a; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi --- dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa ----- Indonesia. -----
 - c. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak--- melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di atas, pemegang saham - dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan -- untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS. -----
10. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 9 huruf c harus memperhatikan penetapan Ketua - Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----
- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----
- PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
- Pasal 11 -----
- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara --- Republik Indonesia dan wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----- utamanya; atau -----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -- tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
 - 2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar-- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- khususnya di bidang Pasar Modal: -----
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) --- hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal -- Pemanggilan. -----
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2- huruf a Pasal ini paling kurang memuat: -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---- dalam RUPS; -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat; -----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - tanggal pemanggilan RUPS. -----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -- pemegang saham, selain memuat hal yang disebut -- pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat ----- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS-- karena adanya permintaan dari pemegang saham. ---
 - d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan-- paling kurang dilakukan melalui: -----
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

- yang berperedaran nasional; -----
- Situs web Bursa Efek; dan -----
- Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing --- yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.---
- 3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- khususnya di bidang Pasar Modal: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ---- pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)- hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-- RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:-
 - Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---- dalam RUPS; -----
 - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----- setiap mata acara tersebut; dan -----
 - Informasi yang menyatakan bahan terkait mata -- acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak- tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -- dengan RUPS diselenggarakan. -----
- c. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang ---- Saham yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek ---- paling kurang melalui: -----
 - 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang-- berperedaran nasional; -----
 - situs web Bursa Efek; dan -----
 - situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing --- yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. --
- d. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat --- maka Perseroan wajib memenuhi persyaratan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- khususnya di bidang Pasar Modal. -----
- 4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara --- rapat bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ---- RUPS. -----
- 5. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara ---- rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat- 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.--
- 6.a. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan- Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal --- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

ketiga maka RUPS dipimpin oleh Presiden -----
Direktur, dalam hal ia tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota--
Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh --
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ----
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

- b. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -----
mempunyai benturan kepentingan dengan mata ----
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS ---
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya--
yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin--
oleh Presiden Direktur. -----
- d. Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan-
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang -
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -
kepentingan. -----
- e. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah-
seorang pemegang saham bukan pengendali yang --
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya--
yang hadir dalam RUPS. -----

7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan-
wewenangannya untuk hadir dalam RUPS yaitu sesuai ----
dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau
Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang --
demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat-
di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan ----
peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat di-
mana saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. -
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah -
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --
dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

----- Pasal 12 -----

- 1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum -----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan
di bidang Pasar Modal telah dipenuhi. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di ---
atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS--
kedua dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
RUPS kedua dilangsungkan; -----
- Dalam pemanggilan RUPS kedua menyebutkan RUPS
pertama telah dilangsungkan dan tidak -----
mencapai kuorum kehadiran; -----
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu--
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS-
pertama dilangsungkan. -----
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----
tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga
dengan ketentuan pemanggilan RUPS ketiga atas--
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas--
Jasa Keuangan dan dalam pemanggilan RUPS ketiga
menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan
tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
d. Ketentuan media pemanggilan sebagaimana diatur--
dalam Pasal 11 ayat 3 huruf c berlaku mutatis -
mutandis untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga. ----
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ----
Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah--
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS. Dalam hal terjadi ralat -----
pemanggilan RUPS, pemegang saham yang berhak hadir--
dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ---
(satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. --
Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam --
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan,
dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang ----
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada ----
Direksi sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum ----
Tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada --
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan ---
suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-

1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir ---- dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --- suara. -----

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-- untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS berdasarkan ketentuan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ----- ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang-- berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. -----

8.a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang ----- mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 harus diambil -- dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham ---- independen, yaitu pemegang saham yang tidak --- mempunyai benturan kepentingan atas transaksi - tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak ----- mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, - dan keputusan tersebut diambil berdasarkan ---- suara setuju dari Pemegang Saham Independen --- yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang - Saham Independen. -----

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang- saham utama, anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan-- dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak- mengeluarkan saran atau pendapat. -----

c. Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ----- ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang- hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi -- persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS -- pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS (namun- tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan RUPS ---- sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11), ---- asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau ----- diwakili Pemegang Saham Independen yang ----- memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan

keputusan diambil berdasarkan suara setuju ---- lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah-saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen - yang hadir/diwakili dalam RUPS. ----- Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga - tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang-ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan - sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh-Otoritas Jasa Keuangan. ----- RUPS ketiga hanya dapat menyetujui transaksi -- dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham-Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima - puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki - oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau-diwakili dalam RUPS. -----

9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang --- saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: -
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut ----- berhubungan langsung dengan salah satu acara ---- RUPS yang bersangkutan; dan -----
 - b. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ----- berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. ----

----- D I R E K S I -----
----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di - bawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari -- sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi,-- dengan susunan sebagai berikut : -----

- a. seorang Presiden Direktur;-----
- b. seorang Wakil Presiden Direktur;-----
- c. seorang Direktur atau lebih.-----

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang- perseorangan yang pada saat diangkat dan selama ---- menjabat memenuhi persyaratan sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, ----- masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun----- terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya---- sampai ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak---- tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi- hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS- yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila ----- tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh ---- RUPS. -----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir- dapat diangkat kembali. -----

4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna ----- menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan ----

berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat-
suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan --
lain dalam Anggaran Dasar. -----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -
Direksi yang diberhentikan secara demikian atau ----
untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan -
diri pada waktu yang sama seakan-akan telah menjadi-
anggota Direksi pada hari anggota yang digantikan --
itu diangkat sebagai anggota Direksi. -----
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap- --
tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah -----
maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -----
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan --
Komisaris. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri dimaksud. -----
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat--
sebelumnya, maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi -
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan ----
minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. -----
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi ---
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota--
Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong -----
tersebut. -----
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka--
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka -
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara. -----
10. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 9 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah-
lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak -----
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara -----
anggota Direksi menjadi batal. -----
11. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 -
(enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut
harus diumumkan pemberitahuan tentang akan -----
diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan-
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan-

Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.--

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta ---
pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran -----
dirinya, dalam RUPS berikutnya. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 12; --
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. -

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk menjalankan kepengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai
maksud dan tujuannya. -----

Tugas pokok Direksi adalah: -----

a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Perseroan; -----
b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan ----
Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik-
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan-
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-
pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam uang atas nama Perseroan;-----
- b. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak-----
ketiga;-----
- c. mengikat Perseroan sebagai penanggung/--
penjamin;-----
- d. membeli, menjual atau dengan alasan lain-----
mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang
tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan
hak-hak atas tanah;-----
- e. menggadaikan atau memberatkan barang-barang---

- kekayaan Perseroan;-----
- f. menjual saham anak-anak perusahaan yang -----
dimiliki Perseroan; -----
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan ----
Komisaris Perseroan. -----
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk -----
mengalihkan, melepaskan hak dan menjadikan jaminan -
utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan ---
Perseroan, dalam satu tahun buku, baik dalam satu --
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ----
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, ----
Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dengan -----
ketentuan mengenai kuorum dan keputusan seperti yang-
ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan ---
Terbatas dan peraturan yang berlaku di bidang pasar-
modal. -----
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa -----
transaksi yang memuat benturan kepentingan antara --
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan-
Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan --
ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan -
RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari -----
pemegang saham yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
8 butir a. -----
Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau -----
meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada ---
para pemegang saham Perseroan. -----
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal-
ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris-
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan ---
tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 pasal ini. -
- 7.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---
mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi ----
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya ----
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam ---
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian ---

harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. ---

9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----
----- Pasal 15 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh salah seorang dari anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui faksimili atau surat elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan Tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----

Bahan rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat berkala diadakan, kecuali ditetapkan lain oleh Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan rapat. -----

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. -----

apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi ---

lainnya. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ---
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya--
lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah ----
anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam
rapat dimana didalamnya termasuk Presiden Direktur,-
apabila Presiden Direktur tidak hadir dan tidak ----
diwakili secara sah, maka oleh Wakil Presiden -----
Direktur atau kuasanya yang sah. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasar-
kan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai--
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --
berdasarkan persetujuan dari sedikitnya lebih dari -
50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi
yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat,
dimana didalamnya termasuk Presiden Direktur, atau--
apabila Presiden Direktur tidak hadir, dan tidak ---
diwakili secara sah, maka oleh Wakil Presiden -----
Direktur atau kuasanya yang sah. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang -----
akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan -----
kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ----
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak ----
dari yang hadir. -----

c. Anggota Direksi atau kuasanya yang hadir dalam
Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara -
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ---
sama dengan suara mayoritas anggota Direksi --
yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi. -

12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh --
Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi -----
lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada--
Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh--
seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan--
kepada seluruh anggota Direksi. -----
-Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk ---
para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam rapat yang -----
bersangkutan. -----
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penanda---

tanganan demikian tidak disyaratkan, kecuali oleh --
Direktur yang diberi kewenangan oleh Direksi. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ---
secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud ----
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menanda tangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
(circular) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi. -----

14. Rapat Direksi dapat dilaksanakan dengan -----
menggunakan konferensi melalui telepon atau video --
atau dengan peralatan komunikasi sejenis dimana ----
anggota rapat dapat mendengar dan didengar oleh ----
anggota rapat lainnya yang tidak hadir secara fisik,
yang dalam hal ini tetap dianggap ikut serta dalam -
rapat tersebut. Direksi yang hadir pada rapat -----
dengan cara demikian, dihitung dalam kuorum dan ----
dianggap memenuhi kuorum yang dipersyaratkan selama-
rapat berlangsung. Semua keputusan yang disetujui---
oleh Direksi dalam rapat tersebut dianggap sama ----
efektifnya dengan persetujuan keputusan yang -----
diambil pada rapat dimana anggota rapat hadir -----
secara fisik. Rapat yang dilaksanakan dengan -----
menggunakan konferensi melalui telepon atau video --
atau dengan peralatan komunikasi sejenis, seperti --
yang telah disebutkan sebelumnya, akan dipimpin ----
oleh salah seorang Direksi yang dipilih diantara ---
mereka atau oleh salah seorang Direksi yang hadir --
pada tempat yang disetujui oleh Direksi yang -----
mengikuti rapat, sebagai tempat dimana rapat -----
dilaksanakan, dengan catatan, sedikitnya satu orang-
anggota Direksi hadir secara fisik pada tempat ----
tersebut selama rapat berlangsung dan berita -----
acaranya ditanda tangani oleh Ketua Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari minimal 3 (tiga) -
orang anggota, yakni :-----
 - a. seorang Presiden Komisaris;-----
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris;-----
 - c. seorang Komisaris atau lebih.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris -----
adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat---
dan selama menjabat memenuhi persyaratan sesuai ----
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,---
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5-

(lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang-----
mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS tahunan yang---
kelima setelah tanggal pengangkatannya, apabila masa
jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir -----
sedangkan RUPS tahunan yang kelima tidak -----
memberhentikannya (mereka) maka kepada anggota Dewan
Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya. -----

4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan berdasarkan ayat 3 pasal ini atau ----
bilamana terdapat suatu lowongan, dengan tidak -----
mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. ----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota--
Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian -
atau untuk mengisi lowongan tersebut harus -----
mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan--
telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari ----
anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota
Dewan Komisaris. -----

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi-----
jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 -
pasal ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya --
telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji -----
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh --
RUPS. -----

7. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri--
dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. --
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan--
pengunduran diri dimaksud. -----

8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat -
sebelumnya, maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris--
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ----

9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan--
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan ---
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka --
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris--
Perseroan. -----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi ---
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota--

Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, -----
jika: -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; ---
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan. -

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 17 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan --
serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja-
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -
dan mencocokkan keadaan uang kas dan hal-hal lain---
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang -
telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. -----

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak --
setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,-
apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau -
melalaikan kewajibannya. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai ---
alasan. -----

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----
setelah tanggal pemberhentian sementara itu atau ---
dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, --
Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan --
RUPS yang akan memutuskan untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota
Direksi tersebut, sedangkan anggota Direksi yang ---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk-
hadir guna membela diri. -----

7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -
oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir,-
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota-

Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah-----
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ---
yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai---
dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 11. ----
8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini ---
tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90-
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian-
sementara atau dengan mengindahkan ketentuan hukum--
yang berlaku, maka pemberhentian sementara itu ----
menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang --
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya ----
semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -
untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara ---
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan,
dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas nama----
Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris dapat --
memutuskan salah seorang anggota atau lebih dari ---
Dewan Komisaris untuk mengurus sementara Perseroan.-

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan ---
Komisaris secara berkala atau setiap waktu bilamana-
dipandang perlu oleh salah seorang dari anggota ----
Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat--
Direksi, dengan memperhatikan ketentuan perundang--
undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar ---
Modal. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ---
oleh Presiden Komisaris, atau dalam hal Presiden ---
Komisaris berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota ---
Dewan Komisaris lainnya.-----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----
secara langsung kepada anggota Dewan Komisaris, atau
melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima-
yang layak, atau melalui faksimili atau surat -----
elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat ----
tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari --
sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal Rapat Dewan Komisaris. Bahan rapat -----
disampaikan kepada seluruh anggota rapat sekurang--
kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, ----
kecuali ditetapkan lain oleh Direksi. Apabila-----
hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera -----
diselesaikan maka jangka waktu pemanggilan itu -----
dapat dipersingkat menjadi sekurang-kurangnya 3 ----

(tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan rapat dan bahan-
Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang ----
telah disusun disampaikan kepada seluruh peserta ---
rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.--
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama
Perseroan atau baik didalam maupun diluar wilayah---
Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut-----
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat---
diadakan di tempat kedudukan atau ditempat kegiatan-
usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya -----
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia--
sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan
rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden---
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat-
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan ----
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang--
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang--
hadir.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat--
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh----
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan-
surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak----
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila----
sedikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari-
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili -
secara sah dalam rapat, dimana didalamnya termasuk -
Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris ---
tidak hadir dan tidak diwakili secara sah, maka oleh
Wakil Presiden Komisaris atau kuasanya yang sah. ---
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan persetujuan dari -----
sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari--
jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau--
diwakili secara sah dalam rapat, dimana didalamnya -
termasuk Presiden Komisaris, atau apabila Presiden--
Komisaris tidak hadir, dan tidak diwakili secara ---
sah, maka oleh Wakil Presiden Komisaris atau -----
kuasanya yang sah.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara dari setiap anggota---
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan -----
kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ----
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak ----
dari yang hadir. -----

c. Anggota Dewan Komisaris atau kuasanya yang ---
hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan --
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas anggota -----
Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam-
Rapat Dewan Komisaris. -----

12. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus -----
dibuat dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua
rapat dan semua anggota Dewan Komisaris yang hadir--
dan/atau kuasa anggota Dewan Komisaris.-----
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penanda --
tanganan tersebut tidak disyaratkan, kecuali oleh---
Komisaris yang diberi kewenangan oleh Dewan -----
Komisaris.-----

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat
dan ditanda tangani menurut ketentuan ayat 12 pasal-
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik -----
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak--
ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang-----
diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-
yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris,----
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan---
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis serta menanda tangani persetujuan---
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
(circular) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-
Komisaris. -----

15. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dengan
menggunakan konferensi melalui telepon atau video --
atau dengan peralatan komunikasi sejenis, dimana --
anggota rapat dapat mendengar dan didengar oleh ----
anggota rapat lainnya yang tidak hadir secara fisik,
yang dalam hal ini tetap dianggap ikut serta dalam--
rapat tersebut. Dewan Komisaris yang hadir pada ---
rapat dengan cara demikian, dihitung dalam kuorum --

dan dianggap memenuhi kuorum yang dipersyaratkan --- selama rapat berlangsung. Semua keputusan yang ----- disetujui oleh Dewan Komisaris dalam rapat tersebut dianggap sama efektifnya dengan persetujuan ----- keputusan yang diambil pada rapat dimana anggota --- rapat hadir secara fisik. Rapat yang dilaksanakan-- dengan menggunakan konferensi melalui telepon atau-- video atau dengan peralatan komunikasi sejenis, ---- seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan ----- dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang --- dipilih diantara mereka atau oleh salah seorang ---- Dewan Komisaris yang hadir pada tempat yang ----- disetujui oleh Dewan Komisaris yang mengikuti rapat sebagai tempat dimana rapat dilaksanakan, dengan --- catatan, sedikitnya satu orang anggota Dewan ----- Komisaris hadir secara fisik pada tempat tersebut -- selama rapat berlangsung dan berita acaranya ditanda tangani oleh Ketua Rapat.-----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
----- Pasal 19 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat-- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun- buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir a- di atas harus disampaikan paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan- datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 -- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh- satu) Desember tahun yang sama. ----- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan --- Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan-- kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS ----- Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-- Kantor Perseroan paling lambat pada tanggal ----- Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS- agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----
----- Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku - seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ---- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ----

RUPS Tahunan tersebut. -----

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS -----
Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih -----
Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -
dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh -
RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan -----
berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi -
yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta usul -----
mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin -----
dibagikan, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS ---
Tahunan untuk memutuskan lain. -----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----
peruntukkan lain, maka laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang -
dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. -----

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ---
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -
yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ---
mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan ----
bentuk dividen. -----
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ----
ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS-
Tahunan dalam mana keputusan untuk pembagian dividen
diambil. -----
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada semua pemegang saham. Pengumuman pembagian---
dividen dilakukan bersamaan dengan pengumuman -----
hasil RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.-----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -
dicatat dan dimasukkan dalam neraca dan dalam tahun-
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat--
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan --
dalam neraca itu belum sama sekali tertutup, -----
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris
berhak untuk membagi dividen sementara apabila -----
keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ----
ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ----
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan --
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang -
diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar. -----

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada-
tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih
seperti tersebut dalam laporan keuangan yang telah -

disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak ---
Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya
ditentukan oleh RUPS Tahunan. -----

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak-
diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen----
lampau dimasukkan ke dalam cadangan khusus RUPS ----
mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah---
dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut.-----
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus-
sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam-
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah itu --
akan menjadi hak Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Bagian dari laba yang dialokasikan untuk dana--
cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan-
usul Direksi, bilamana ada, dan dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor, hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah
20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat memutuskan -
agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah-
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi -
keperluan Perseroan. -----

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3-
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS -----
Tahunan, harus dikelola oleh Direksi dengan cara ---
yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah ----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan --
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 22-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam -----
RUPS. -----